

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PRODUKSI PADI
(STUDI KASUS: KECAMATAN BASO)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RITA KARIM
BP/NIM: 2010/17843

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI
(STUDI KASUS : KECAMATAN BASO)**

Nama : Rita Karim

BP/NIM : 2010/17843

Keahlian : Ekonomi Publik

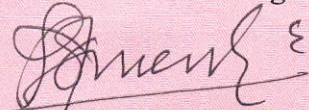
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2014

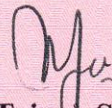
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 196211051987031002

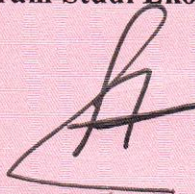
Pembimbing II



Mike Triani, SE, MM
NIP. 198401292009122002

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Alianis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

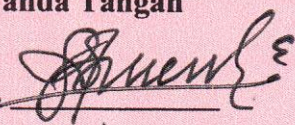
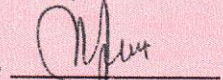
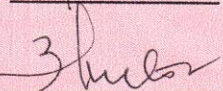
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI (STUDI KASUS : KECAMATAN BASO)

**NAMA : RITA KARIM
NIM/BP : 17843 / 2010
KEAHLIAN : EKONOMI PUBLIK
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI**

Padang, Juni 2014

Tim Penguji:

No Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. Akhirmen, M.Si	1. 
2. Sekretaris	Mike Triani, SE, M.M	2. 
3. Anggota	Melti Roza Adry, SE, M.E	3. 
4. Anggota	Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Karim
NIM/Thn Masuk : 17843 / 2010
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 20 Mai 1992
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Sungai Cubadak - Baso Kab. Agam
No Telp / HP : 085766038385
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan
Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi
(Studi Kasus : Kecamatan Baso)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran sendiri tanpa bantuan dari orang lain secara penuh melainkan arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat dari orang yang telah dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan.
4. Skripsi ini akan sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku, serta sanksinya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juni 2014

Yang menyatakan,



Rita Karim

NIM/BP 17843/2010

ABSTRAK

Rita Karim 17843/2010: Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi (Studi Kasus: Kecamatan Baso). Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si dan Ibu Mike Triani, SE, M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) efektivitas kebijakan subsidi pupuk; (2) Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi padi di kecamatan Baso; (3) Pengaruh bibit terhadap produksi padi di kecamatan Baso; (4) Pengaruh pupuk terhadap produksi padi di kecamatan Baso; (5) Pengaruh efektivitas kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi padi di kecamatan Baso; dan (6) Pengaruh tenaga kerja, bibit, pupuk dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk secara bersama-sama terhadap produksi padi di kecamatan Baso.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dan asosiatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Baso pada bulan Januari 2014. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Analisis regresi linear berganda; (2) Uji normalitas; (3) Uji multikolinearitas; (4) Uji heterokedastisitas; (5) Koefisien determinasi; (6) Uji t; dan (7) Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan subsidi pupuk belum efektif berdasarkan empat indikator keberhasilan subsidi pupuk dengan persentase ketepatan 48,71 % atau berada di bawah 80 %; (2) Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap produksi padi di kecamatan Baso, dengan tingkat signifikan sebesar 0,0009 dan tingkat pengaruh sebesar 0,171 satuan; (3) Bibit berpengaruh signifikan dan positif terhadap produksi padi di kecamatan Baso, dengan tingkat signifikan sebesar 0,0000 dan tingkat pengaruh sebesar 1,145 satuan; (4) Pupuk berpengaruh signifikan dan positif terhadap produksi padi di kecamatan Baso, dengan tingkat signifikan 0,0034 dan tingkat pengaruh sebesar 0,163 satuan; (5) Efektivitas kebijakan subsidi pupuk tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap produksi padi di kecamatan Baso, tingkat signifikan sebesar 0,5211 dan tingkat pengaruh sebesar 0,079; dan (6) Tenaga kerja, bibit, pupuk, dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi padi di kecamatan Baso, dengan probabilitas sebesar 0,000. Dengan tingkat sumbangan bersama-sama sebesar 62,2 %.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi pupuk karena masih belum dikategorikan efektif. Diharapkan kepada petani agar dapat mengoptimalkan penggunaan lahan usahatani mereka, dan Dinas pertanian diharapkan lebih intensif membina para petani serta penyuluhan kepada petani dalam penggunaan teknologi dan mengupayakan sistem pertanian yang canggih serta modern sehingga dengan sendirinya jumlah produksi padi juga akan meningkat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi (Studi Kasus: Kecamatan Baso)** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Mike Triani, SE, M.M selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Alianis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
3. Ibu Melti Roza Adry SE, M.E dan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa M.S selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan saran-saran serta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

4. Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta dan Ayahanda yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2010 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Juni 2014
Penulis

Rita Karim

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Produksi	10
2. Efektivitas	15
3. Subsidi.....	18
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi.....	26
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Variabel Penelitian.....	45

E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Defenisi Operasional Variabel.....	46
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Baso	55
2. Karakteristik Responden.....	56
3. Deskripsi Variabel Penelitian	58
4. Analisis Induktif	70
B. Pembahasan	79
1. Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk	79
2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produksi Padi di Kecamatan Baso	80
3. Pengaruh Bibit terhadap Produksi Padi di Kecamatan Baso.	82
4. Pengaruh Pupuk terhadap Produksi Padi di Kecamatan Baso	83
5. Pengaruh Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Produksi Padi di Kecamatan Baso	84
6. Pengaruh Tenaga Kerja, Bibit, Pupuk, dan Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Produksi Padi di Kecamatan Baso	86
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Subsidi Pupuk, 2007-2011	3
2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kecamatan Baso Tahun 2007-2012	4
3. Rata-rata Pengeluaran per Musim Tanam per Hektar Usaha Tani Padi Sawah Menurut Jenis pengeluaran	5
4. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.....	6
5. Jumlah Penduduk Kabupaten Agam dan Laju Pertumbuhannya dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010	7
6. Tabel Distribusi Populasi yang Tergabung dalam Kelompok Tani di Kecamatan Baso.....	43
7. Jumlah Sampel Petani Dalam Kelompok Tani di Kecamatan Baso	45
8. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kecamatan Baso Tahun 2013	56
9. Distribusi Frekuensi Usia Petani Padi Sawah di Kecamatan Baso	57
10. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Petani Padi Sawah di Kecamatan Baso.....	58
11. Distribusi Frekuensi Jumlah Tenaga Kerja Usahatani Padi di Kecamatan Baso.....	59
12. Distribusi Frekuensi Jumlah Bibit UsahaTani Padi Kecamatan Baso	61
13. Distribusi Frekuensi Penggunaan Pupuk Pada Usahatani Padi di Kecamatan Baso perhektar.....	63
14. Persentase Tingkat Ketepatan Harga Pupuk Bersubsidi	64
15. Persentase Tingkat Ketepatan Jumlah Pupuk Bersubsidi	65

16. Persentase Tingkat Ketepatan Tempat Pupuk Bersubsidi.....	66
17. Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pupuk Bersubsidi	66
18. Persentase Tingkat Keefektifan Kebijakan Subsidi Pupuk.....	68
19. Distribusi Frekuensi Jumlah Produksi Padi di Kecamatan Baso	69
20. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda	71
21. Hasil Uji Normalitas	72
22. Hasil Estimasi Uji Multikolinearitas.....	73
23. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Total Produksi, Rata-rata Produksi dan Marginal Produksi	14
2. Pengaruh Subsidi terhadap Kurva Penawaran dan Produksi	25
3. Kerangka Konseptual Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya terhadap Produksi Padi (Studi Kasus: Kecamatan Baso).....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket Penelitian.....	95
2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	100
3. Uji Normalitas.....	101
4. Uji Heterokedastisitas	102
5. Uji Multikoniearitas.....	103
6. Table t	105
7. Tabel F	108
8. Tabel Distribusi Frekuensi Penelitian	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Pertanian merupakan salah satu sektor industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja. Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010 sektor pertanian menyumbang tenaga kerja sebanyak 42 juta orang lebih dari jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja utama yang hampir mencapai 110 juta orang. Oleh karena itu, terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung produksi sektor pertanian.

Keberlangsungan sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling keterkaitan. Seperti halnya pendayagunaan sumber daya pertanian yang menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian sehingga sumber daya yang terbatas itu harus dialokasikan seefisien mungkin. Seperti diketahui sumber daya pertanian yang terdiri dari lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, termasuk unsur-unsur yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya yang utama untuk kelangsungan sektor pertanian. Pengelolaan yang tidak bijaksana dan mengacu kedepan akan berakibat menurunnya kualitas sumber daya itu sendiri yang akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas pertanian.

Industri pupuk merupakan faktor yang berpengaruh dalam penyediaan faktor produksi pertanian seperti pupuk. Berbagai investasi serta kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah seperti subsidi untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai macam aspek yaitu teknis, penyediaan dan distribusi maupun kebijakan harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif, namun demikian berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik masih sering terjadi berbagai kasus yaitu terjadinya kelangkaan pasokan pupuk subsidi yang menyebabkan harga aktual melebihi HET.

Khusus mengenai kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan salah satu kebijakan yang secara historis menjadi tulang punggung kebijakan subsidi bidang pertanian di Indonesia. Penyediaan pupuk dengan harga murah melalui pemberian subsidi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berikut ini data perkembangan subsidi pupuk tahun 2007-2011:

Tabel 1. Perkembangan Subsidi Pupuk, 2007-2011

URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
Subsidi Pupuk (Triliun Rupiah)	6,3	15,2	18,3	18,4	18,8
Faktor-faktor yang mempengaruhi:					
a. Volume (ribu ton)	6.353,0	6.891,0	7.612,0	7.355,0	9.753,9
UREA	4.249,0	4.558,0	4.624,0	4.279,0	5.100,0
SP-36	765,0	558,0	582,1	644,0	750,0
ZA	702,0	751,0	751,3	713,0	850,0
NPK	637,0	956,0	1.417,7	1.473,0	2.349,9
ORGANIK		68,0	236,5	246,0	7004,0
b. Harga pokok produksi (Rp 000/ton)					
UREA	1.803,0	2.153,0	2.729,1	2.729,1	3.132,4
SP-36	2.432,0	2.655,0	2.525,6	2.525,6	3.138,9
ZA	1.815,0	3.573,0	2.498,0	2.498,0	2.421,8
NPK	3.104,0	5.134,0	5.164,8	5.164,8	5.099,8
ORGANIK		1.582,0	1.508,1	1.525,5	1.665,1
c. Harga eceran tertinggi (Rp 000/ton)					
UREA	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.600,0	1.600,0
SP-36	1.550,0	1.550,0	1.550,0	2.000,0	2.000,0
ZA	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.400,0	1.400,0
NPK	1.750,0	1.750,0	1.722,0	2.300,0	2.300,0
ORGANIK		1.000,0	500,0	700,0	700,0

Sumber: Kementerian Pertanian, 2012

Pada tabel 1 terlihat bahwa kebijakan pemerintah yang cenderung terus meningkatkan subsidi pupuk setiap tahunnya (2007-2011) bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan. Kebijakan ini dilandasi pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut.

Padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dikembangkan, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar dan pokok terhadap pangan. Oleh karena itu, produksi padi harus ditingkatkan agar terciptanya ketahanan pangan. Untuk gambaran lebih jelas mengenai keadaan

pertanian padi sawah di kecamatan Baso akan dipaparkan data-data yang berkaitan dengan pertanian di daerah tersebut. Pada tabel 2 akan dipaparkan data mengenai luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di kecamatan Baso.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kecamatan Baso Tahun 2007-2012

Tahun	Luas panen (Ha)	Produksi(Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2007	2.515	12.600	5,01
2008	2.475	14.574	5,88
2009	2.718	16.217	5,97
2010	2.830	17.528	6,19
2011	2.608	14.161,44	5,43
2012	2.890	15.345,37	5,31

Sumber: BPS Kabupaten Agam dalam Angka 2012.

Tabel 2. menggambarkan perkembangan luas lahan, produksi, dan produktivitas padi sawah yang mengalami peningkatan yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2007 luas lahan padi sawah sebesar 2.515 Ha dengan produktivitas 5,01 ton/ha yang mana jumlah produksi sebesar 12.600 ton. Pada tahun 2008 luas lahan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 2.475 Ha, namun produktivitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar 0,87 ton/ha, dan jumlah produksinya juga meningkat dengan selisih 1.974 ton. Dan pada tahun 2009-2010 luas lahan serta produksi dan produktivitas padi sawah di kecamatan Baso mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan luas lahan menjadi 2.608 Ha dengan hasil produksi yang juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 14.161,44 ton dengan produktivitas 5,43 ton/ha. Kemudian pada tahun 2012 luas lahan padi sawah meningkat dari tahun

sebelumnya dengan selisih 282 Ha dengan produksi yang juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.183,93 ton, namun produktivitas menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,12 ton/ha. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan bibit, penggunaan pupuk yang tidak efisien dan disertai dengan luas lahan, pengolahan lahan yang dilakukan. Selain itu, tenaga kerja yang digunakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya hasil produksi padi sawah. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan terpenuhinya kebutuhan faktor produksi di tingkat petani sehingga dapat mendukung peningkatan produksi padi yang juga akan mendukung ketahanan pangan terkait dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran per Musim Tanam per Hektar Usaha Tani Padi Sawah Menurut Jenis pengeluaran

Rincian	Nilai (000 Rp)	Biaya(%)
Bibit/ benih	205,54	3,46
Pupuk	786,42	13,26
Pestisida	180,75	3,05
Tenaga Kerja	1586,01	26,73
Sewa Lahan	734	12,37
Alat/Sarana Usaha	463	7,8
Jasa	1553	26,18
Lainnya (bunga kredit, iuran irigasi, PBB lahan sawah , dll)	424	7,15
Jumlah	5932,72	100

Sumber: BPS Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan Sumbar 2007-2011

Efektivitas subsidi pupuk menjadi hal yang penting dalam mendukung produksi sektor pertanian. Pada tabel 3 terlihat bahwa pupuk mempunyai proporsi sebesar 13,26 persen terhadap keseluruhan biaya produksi padi per hektar pada setiap musim tanamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk mempunyai proporsi yang besar dalam biaya produksi padi sehingga pupuk

menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan petani. Pupuk menjadi input yang perlu disubsidi pemerintah terkait dengan peranannya yang penting dalam menentukan produksi pertanian.

Efektivitas subsidi pupuk juga berkaitan dengan harga pupuk bersubsidi di lapangan. Penetapan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Bupati Agam No. 42 Tahun 2012 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian di kabupaten Agam tahun 2013

Tabel. 4 Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Jenis Pupuk	HET (Rp/kg)
Urea	1.800
SP-36	2.000
ZA	1.400
NPK	2.300
Organik	500

Sumber: Peraturan Bupati Agam No 42 Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4. Dapat dilihat harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Agam. Penetapan ini bertujuan untuk tetap mengendalikan harga pupuk bersubsidi di pasar sehingga tetap dapat dijangkau oleh petani. Namun harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan tersebut berbeda dengan harga aktual yang diperoleh petani di pasar dan merugikan petani.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang efektivitas kebijakan subsidi pupuk terhadap kaitannya dengan produksi padi dengan studi kasus kecamatan Baso. Kecamatan Baso dipilih menjadi studi kasus dalam

penelitian ini berdasarkan berbagai pertimbangan seperti yang di jelaskan pada

Tabel 5. Berikut

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Agam dan Laju Pertumbuhannya dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010

Kecamatan	Tahun Sensus 2000	Tahun Sensus 2010	Laju Pertumbuhan
Tanjung Mutiara	24.786	28.311	1,35
Lubuk Basung	59.515	68.198	1,38
Ampek Nagari	18.537	22.570	2
Tanjung Raya	29.794	33.307	1,05
Matur	18.036	16.944	-0,63
IV Koto	22.742	23.036	0,13
Malalak	9.829	9.299	-0,56
Banuhampu	30.007	36.059	1,87
Sungai Pua	20.780	23.042	1,05
Ampek Angkek	35.056	43.347	2,1
Candung	21.093	21.886	0,37
Baso	31.904	33.016	2,85
Tilatang Kamang	30.700	34.027	1,04
Kamang Magek	20.068	19.972	-0,05
Palembayan	29.447	29.426	-0,01
Palupuah	12.678	13.044	0,29
JUMLAH	414.972	455.484	14,23

Sumber: BPS Agam dalam Angka 2013

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat pertumbuhan jumlah penduduk serta laju pertumbuhan penduduk tiap-tiap kecamatan di kabupaten Agam dari sensus penduduk tahun 2000 dan 2010. Kecamatan Baso merupakan kecamatan yang laju pertumbuhannya paling tinggi diantara kecamatan lain di kabupaten Agam yaitu sebesar 2,85. Pertumbuhan penduduk yang selalu mengalami peningkatan menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan

penduduk termasuk peningkatan kebutuhan pangan. Sehingga hal ini dapat menjadi pemicu dalam meningkatkan produksi serta produktivitas hasil pertanian padi. Oleh karena itu, kecamatan Baso dipilih menjadi sampel penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi (Studi Kasus: Kecamatan Baso)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan subsidi pupuk telah efektif di kecamatan Baso?
2. Sejauhmana pengaruh tenaga kerja terhadap produksi padi di kecamatan Baso?
3. Sejauhmana pengaruh penggunaan bibit terhadap produksi padi di kecamatan Baso?
4. Sejauhmana pengaruh penggunaan pupuk terhadap produksi padi di kecamatan Baso?
5. Sejauhmana pengaruh efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan empat indikator keberhasilan (harga, tempat, waktu, jumlah) terhadap produksi padi di kecamatan Baso?
6. Sejauhmana pengaruh tenaga kerja, bibit, pupuk, dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi padi di kecamatan Baso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Efektif atau tidaknya kebijakan subsidi pupuk di kecamatan Baso.
2. Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi padi di kecamatan Baso.
3. Pengaruh penggunaan bibit terhadap produksi padi di kecamatan Baso.
4. Pengaruh penggunaan pupuk terhadap produksi padi di kecamatan Baso.
5. Pengaruh efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan empat indikator keberhasilan (harga, tempat, waktu, jumlah) terhadap produksi padi di kecamatan Baso.
6. Pengaruh bersama-sama tenaga kerja, bibit, pupuk, dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi padi di kecamatan Baso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Ekonomi Pertanian, Ekonomi Mikro, serta Ekonomi Publik.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
4. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Produksi

Dalam pengertian ekonomi, produksi adalah sebagai suatu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghasilkan barang dan jasa atau menaikkan *utility* dari barang-barang ekonomi.

Produksi juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna (*utility*) suatu barang agar memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain produksi hanya meliputi perubahan dalam sifat untuk menghasilkan barang dalam jumlah tertentu dalam suatu periode. Sumber daya atau faktor-faktor produksi termasuk benda-benda yang disediakan atau diciptakan manusia digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang atau jasa yang diperlukan oleh manusia.

Menurut Rahim dan Hastuti (2008:30) produksi pertanian (*on-farm*) merupakan fokus pertama yang akan mempengaruhi proses selanjutnya hingga menghasilkan output. Produksi dapat dinyatakan sebagai perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan komoditas berupa kegiatan usahatani maupun usaha lainnya (penangkapan atau beternak).

Menurut Soekartawi (1994:3) untuk menghasilkan suatu produk, maka diperlukan pengetahuan hubungan antara faktor produksi (*input*) dan produk (*output*). Hubungan antara input dan output ini disebut dengan *factor relationship* (FR). Untuk lebih jelasnya Soekartawi (1994:4) menyatakan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan atas dua kelompok yaitu:

- a. Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan bermacam tingkat kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma, dan sebagainya.
- b. Faktor sosial-ekonomi seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, risiko dan ketidakpastian, kelembagaan, tersedianya kredit, dan sebagainya.

Cobb-Douglas merupakan salah satu fungsi produksi yang paling sering digunakan dalam penelitian empiris. Secara sederhana fungsi produksi *Cobb-Douglas* tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Q = AL^{\alpha} K^{\beta} \dots\dots\dots(2.2)$$

Di mana Q adalah *output* dari L dan K masing-masing adalah tenaga kerja dan barang modal. A, α (alpha) dan β (beta) adalah parameter-parameter positif yang dalam setiap kasus ditentukan oleh data. Semakin besar nilai A, Parameter α mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya kenaikan satu persen L sementara K dipertahankan konstan. Demikian pula parameter β , mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya kenaikan satu persen K sementara L dipertahankan konstan. Jadi, α dan β masing-masing merupakan elastisitas *output* dari modal dan tenaga kerja. Jika $\alpha + \beta = 1$, maka terdapat tambahan hasil yang konstan atas skala produksi, jika $\alpha + \beta > 1$ terdapat tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi dan jika $\alpha + \beta < 1$ maka artinya terdapat tambahan hasil yang menurun atas skala produksi. Pada fungsi produksi *Cobb-Douglas* (Salvatore, 2006: 116).

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal yang digunakan, dan tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi. Padi merupakan komoditas pertanian yang paling banyak dikembangkan, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar dan pokok terhadap pangan. Klasifikasi modal dalam proses produksi padi yaitu bibit, dan pupuk. Pupuk memiliki proporsi yang besar dalam biaya produksi padi sehingga pupuk menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan petani berupa kebijakan subsidi.

Kebijakan subsidi pupuk ini diberikan oleh pemerintah kepada petani untuk mendukung program ketahanan pangan. Kebijakan ini bertujuan agar harga ditingkat petani menjadi lebih murah dan dapat terjangkau oleh petani sehingga modal yang dikeluarkan oleh petani menjadi berkurang, dan produksi padi dapat ditingkatkan.

Kemudian menurut Sukirno (2005:195) fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus:

$$Q = f(K, L, R, T) \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana:

Q = Jumlah produksi yang dihasilkan
 K = Jumlah stok modal
 L = Jumlah tenaga kerja
 R = Kekayaan alam
 T = Teknologi

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan teori produksi, yaitu:

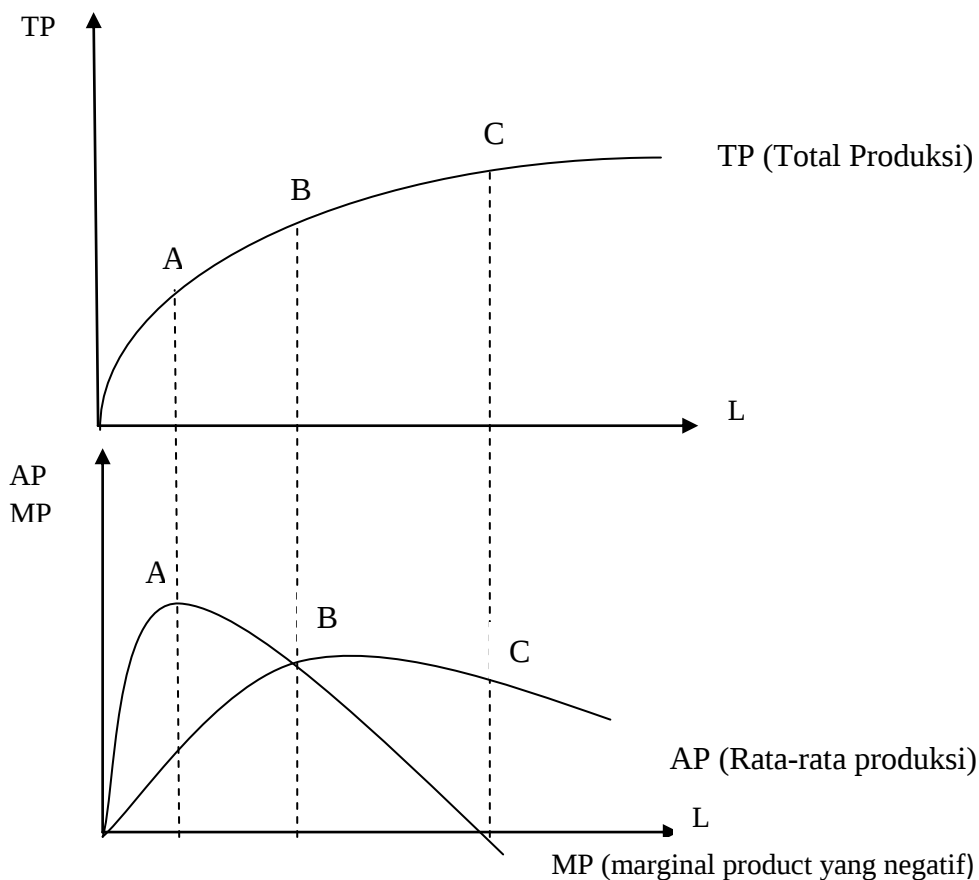
- a. Total produksi (TP) adalah kuantitas produksi seluruhnya sebagai hasil dari pemakaian beberapa fungsi produksi dalam suatu proses produksi.
- b. Marginal produksi (MP) adalah tambahan produksi yang diperoleh dari penambahan kuantitas fungsi produksi yang digunakan.
- c. Produk rata-rata (AP) adalah produksi total dibagi dengan kuantitas faktor produksi yang kuantitasnya dapat diukur.

Fungsi produksi sebanding adalah fungsi dimana dapat menghasilkan n kali lipat satuan produksi asal saja jumlah faktor produksi diperbanyak dengan kelipatan yang sama. Sedangkan pada kombinasi fungsi produksi yang tidak sebanding memungkinkan terjadinya tiga return to scale yaitu *increasing*, *constant* dan *decreasing*.

- a. *Increasing return to scale*, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan total produksi yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Terlihat pada gambar 1 bahwa marginal produksi (MP) lebih besar dari produk rata-rata (AP). Kondisi ini terlihat pada tahap 1, dimana tahap 1 ini akan berakhir sampai $MP = AP$ atau AP memotong MP. Jadi ini terjadi jika proporsi kenaikan output lebih besar dari pada kenaikan input produksi.
- b. *Constant return to scale*, yaitu ditandai dengan marginal produk (MP) yang sudah mulai menurun bila dibandingkan dengan tahap 1 secara grafis terlihat bahwa kurva AP berada di atas kurva MP dan tingkat kemiringan

(slope) kurva produksi total (TP) terlihat lebih datar dari sebelumnya setelah melewati *inflection point* (A), kondisi ini terlihat antara $AP = MP = 0$. Jadi ini terjadi jika proporsi kenaikan dari semua input produksi sama dengan kenaikan output.

- c. *Decreasing return to scale*, yaitu pada saat MP telah berada di bawah sumbu horizontal (negatif) dan kurva TP membelok ke bawah menunjukkan setiap penambahan suatu unit input variabel mengakibatkan penurunan TP. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya porsi faktor input tetap (*fixed*) dengan faktor input yang berubah (*variable*) atau faktor input tetap diperoleh secara intensif. Jadi ini terjadi jika proporsi kenaikan output lebih kecil dari proporsi kenaikan input.



Gambar 1. Total Produksi, Rata-rata Produksi dan Marginal Produksi

Dari gambar 1. dapat terlihat pada saat terjadi penambahan satu unit input dalam produksi, dengan mempertahankan semua faktor produksi lain tetap konstan. Untuk jumlah penggunaan input yang kecil, keluaran meningkat dengan cepat kemudian input ditambahkan tetapi karena semua masukan lain tetap konstan, pada akhirnya kemampuan tambahan input untuk menghasilkan keluaran tambahan mulai menurun. Pada akhirnya saat MP berada di bawah sumbu horizontal (negatif), keluaran mencapai tingkat maksimum dimana pada setiap penambahan input akan mengurangi keluaran (output).

2. Efektivitas

Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Bastian (2010:61) efektivitas menunjukkan kesuksesan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Sedangkan menurut Mardiasmo (2005:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2007:84) efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), sehingga suatu organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau *spending wisely*.

$$\text{Efektivitas} = \text{Outcome} / \text{Output}$$

Ukuran efektivitas dapat dilakukan dengan mengukur kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu pelayanan dikaitkan dengan *output*-nya (*cost of outcome*). Pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur *outcome*. Suatu pelayanan mungkin diproduksi secara efisien akan tetapi tidak efektif karena tidak menambah nilai bagi pelanggan. Jadi efektivitas merupakan suatu ukuran pencapaian target yang menunjukkan output realisasi yang telah tercapai dari *output* yang seharusnya tercapai.

Tepat harga adalah suatu kondisi dimana harga pembelian pupuk oleh petani secara kontan ditingkat pengecer/kios resmi per saknya sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). (Syafa'at *et al.*, 2007) Untuk menghitung ketepatan harga dapat menggunakan rumus berikut ini:

$$\Delta P = P_r - P_p \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana:

ΔP = Perbedaan Harga (Rp)

P_r = Harga yang diterima petani (Rp)

P_p = Harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah (Rp)

Ketepatan harga dalam indikator efektivitas subsidi pupuk diukur berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan rumus tersebut dilihat selisih antara harga aktual dengan HET. Setelah itu dilakukan perbandingan antara petani yang memperoleh harga aktual sama dengan HET dengan petani yang memperoleh harga aktual tidak sama dengan HET. Hasil dari perbandingan petani tersebut ditransformasikan dalam bentuk persen, apabila persentase tepat harga sama dengan atau lebih dari 80 persen maka indikator tepat harga dikategorikan efektif.

Kemudian tepat jumlah/dosis didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana jumlah/dosis pupuk yang dibutuhkan petani terpenuhi yang diindikasikan oleh terpenuhinya dosis rekomendasi atau terpenuhinya dosis kebiasaan petani (Syafa'at *et al.*, 2007).

Untuk menghitung ketepatan jumlah dapat menggunakan rumus berikut ini:

$$\Delta Q = Q_r - Q_p \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana:

ΔQ = perbedaan jumlah (kg/ha)

Q_r = jumlah pupuk yang dipergunakan oleh petani (kg/ha)

Q_p = jumlah pupuk yang disarankan oleh pemerintah (kg/ha)

Dari rumus di atas, dilakukan perbandingan antara petani yang menggunakan pupuk sesuai dengan anjuran dengan petani yang menggunakan pupuk tidak sesuai dengan anjuran dalam bentuk persen. Adapun penggunaan pupuk yang disarankan pemerintah yaitu Urea sebanyak 200 kg/ha, SP36 sebanyak 100 kg/ha, NPK sebanyak 100 kg/ha (UPT BP4K2P). Apabila persentase petani yang menggunakan pupuk sesuai anjuran sama dengan atau

lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan efektif pada indikator tepat jumlah.

Tepat tempat menurut sumber yang sama adalah suatu kondisi dimana pupuk tersedia di dekat/di sekitar rumah atau lahan petani yang diindikasikan dengan pembelian pupuk oleh petani dilakukan di kios di dalam desa. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara petani yang membeli pupuk di dalam desa dengan di luar desa dalam bentuk persen. Apabila persentase yang membeli pupuk di dalam desa sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan efektif pada indikator tepat tempat.

Tepat waktu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pupuk secara fisik tersedia pada saat dibutuhkan oleh petani. (Syafa'at *et al.* 2007). Selanjutnya dilakukan perbandingan antara petani yang berpendapat bahwa pupuk selalu ada setiap dibutuhkan dengan petani yang berpendapat bahwa masih ada kelangkaan pupuk dalam bentuk persen. Apabila persentase tingkat ketepatan atau persentase petani yang menyatakan bahwa pupuk selalu ada ketika dibutuhkan sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa tepat waktu sudah efektif.

Dari keseluruhan persentase indikator dibuat rata-ratanya dalam bentuk persen. Apabila rata-rata tingkat ketepatan sama dengan atau lebih dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa kebijakan subsidi pupuk sudah efektif.

3. Subsidi

Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada para produsen dengan maksud untuk meringankan beban pengeluaran ongkos produksi yang di

tanggung produsen. Maka ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi akan menurunkan harga. Sampai di mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dari adanya subsidi tergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat (UU APBN)

Menurut Hanafie (2010:238) subsidi diartikan sebagai pembayaran sebagian harga oleh pemerintah sehingga harga dalam negeri lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. Ada 2 macam subsidi, yaitu subsidi harga produksi dan subsidi harga faktor produksi.

a. Subsidi Harga Produksi

Subsidi ini bertujuan melindungi konsumen dalam negeri, artinya konsumen dalam negeri dapat membeli barang yang harganya lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. Untuk meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian, khususnya beras, pemerintah memberikan subsidi harga faktor produksi, seperti pupuk, pestisida, dan bibit. Subsidi untuk usaha tani padi yang ditanggung oleh pemerintah sangat besar, misalnya biaya yang ditanggung oleh pemerintah untuk mengimpor atau memproduksi pupuk dalam negeri. Faktor produksi seperti pupuk ini harus di distribusikan ke seluruh pelosok

dengan biaya yang tidak kecil. Biaya transportasi ini ditanggung oleh pemerintah supaya pupuk dapat tersedia secara lokal dengan harga yang relatif murah. Dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi angkutan.

b. Subsidi Harga Faktor Produksi

Untuk membeli pupuk yang harganya masih relatif mahal, seringkali petani tidak memiliki uang tunai. Untuk itu, petani dapat memperoleh kredit dengan bunga yang relatif rendah. Selisih antara bunga bank sesungguhnya dengan bunga yang harus ditanggung petani, dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi kepada petani. Selain untuk melindungi produsen dan konsumen, subsidi juga bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi komoditas tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

a. Pupuk Bersubsidi

Subsidi pupuk di Indonesia dimulai pada tahun 1971, yaitu untuk melengkapi introduksi varietas padi unggul baru. Varietas padi unggul baru tersebut sangat responsif terhadap pupuk. Dengan menanam varietas padi unggul baru, produsen dapat meningkatkan keuntungannya dengan menambah penggunaan pupuk. Dengan adanya subsidi pupuk diharapkan petani bersedia menerapkan penggunaan pupuk sebagaimana yang direkomendasikan sehingga produksi padi meningkat dan kebutuhan pangan dalam negeri tercukupi.

Beban subsidi pupuk timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari harga pasar.

Menurut peraturan Bupati Agam Nomor 42 tahun 2012 pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani, dan mendukung program ketahanan pangan.

Pupuk bersubsidi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Kemudian menurut DirJen Prasarana dan Sarana Pertanian (2012) Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di penyalur/ pengecer resmi atau kelompok tani.

Berdasarkan PERMEN PERDAGANGAN RI NO 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian mengatakan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis

pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pengalaman suksesnya subsidi pupuk yang mendorong penggunaan pupuk dan pada giliran selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan produksi merupakan bukti bahwa sesungguhnya petani sangat respon terhadap harga input produksi.

Jadi, tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan untuk dapat tetap mempertahankan ketahanan pangan.

b. Penyaluran, Pengadaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan NO 15/M-DAG/PER/4/2013 menyatakan bahwa Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri. Menteri menegaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian antara Kementrian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari produsen dan/atau impor. Sedangkan penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan kelompok tani dan/atau

petani sebagai konsumen akhir. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV (pengecer resmi) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen, penyalur Lini III dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip enam tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET). Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya. Pengecer resmi melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggungjawabnya.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, HET serta waktu pengadaan dan penyaluran (Peraturan Bupati Agam Nomor 42 tahun 2012). Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, penyalur Lini III (distributor), penyalur IV (pengecer resmi) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) daerah berdasarkan prinsip enam tepat. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Penyalur Lini III (distributor) wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpanan, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV (pengecer resmi) setempat.

Penyalur Lini IV (pengecer resmi) wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani setempat. KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah serta melaporkan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada produsen selaku penanggungjawab wilayah. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh KPPP di daerah bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT) dan Ketua Gabungan Kelompok Tani.

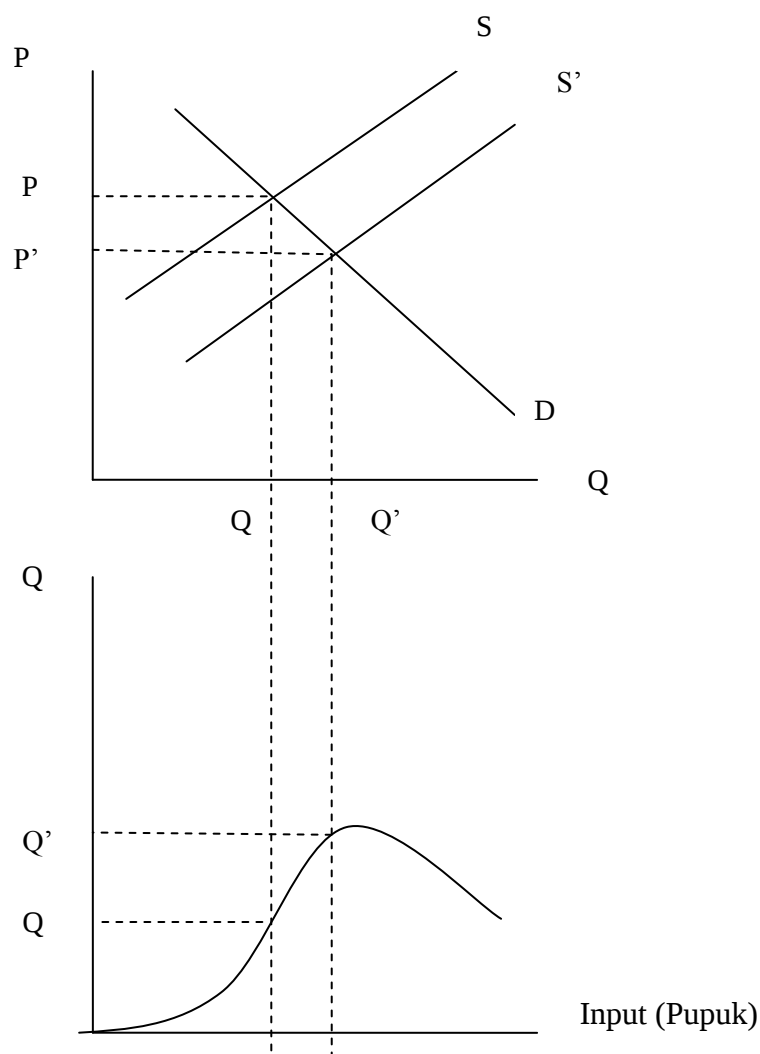
c. Pengaruh Subsidi Pupuk terhadap Produksi

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan pupuk pada petani serta harga pupuk di tingkat petani dapat terjangkau oleh petani sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan dapat tetap mempertahankan ketahanan pangan.

Usaha untuk meningkatkan produksi padi diikuti oleh penyediaan penunjuang produksi, salah satunya adalah ketersediaan pupuk. Penggunaan pupuk berimbang dalam usaha tani padi sangat perlu dilakukan, namun di satu sisi harga pupuk sangat mahal, oleh karenanya

pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan subsidi pupuk kepada petani. Pengaruh adanya subsidi akan dijelaskan Gambar 2. Pada kurva ini akan dilihat adanya pengaruh dari pemberian subsidi terhadap kurva penawaran pupuk dan produksi padi.

a. Pengaruh Subsidi terhadap Kurva Penawaran Pupuk



b. Pengaruh Subsidi terhadap Produksi

Gambar 2. Pengaruh Subsidi terhadap Kurva Penawaran dan Produksi

Dari Gambar 2. dapat terlihat pengaruh adanya subsidi terhadap kurva penawaran dan produksi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan, sehingga harga lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat, subsidi pupuk merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani agar dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah. Adanya subsidi menyebabkan penawaran pupuk bertambah dari S ke S' . Pupuk yang ditawarkan di pasar menjadi bertambah dari Q ke Q' , sedangkan harga keseimbangan pasar dengan adanya subsidi akan turun dari P ke P' seperti terlihat pada kurva a. Dampak dari adanya subsidi adalah biaya produksi menjadi lebih rendah yang menyebabkan kemampuan produsen untuk membeli input produksi lebih tinggi sehingga jumlah input produksi meningkat. Adanya peningkatan input produksi akan menyebabkan jumlah barang yang di produksi menjadi naik (dari Q ke Q') seperti terlihat pada kurva b. Jadi, adanya subsidi dapat meningkatkan kemampuan produksi suatu barang.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi produksi. Menurut Soekartawi (1994:7) faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam

tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu yang berumur antara 15-64 tahun, merupakan penduduk potensial yang dapat bekerja untuk memproduksi barang atau jasa. (Daniel, 2002:87)

Soekartawi (2002:25) mengatakan bahwa penggunaan tenaga kerja pada bidang pertanian didasarkan pada besarnya tenaga kerja yang berupa penggunaan tenaga kerja yang efektif. Suatu usaha akan menentukan besar kecilnya tenaga kerja yang dibutuhkan dan klasifikasi tenaga kerja yang diperlukan.

Usaha pertanian skala kecil akan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tidak membutuhkan tenaga ahli. Menurut Mubyarto (1989:123) Dalam usaha tani sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani ini merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dalam uang. Sedangkan pada usaha skala besar lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar keluarga dengan sewa dan juga merupakan tenaga kerja ahli seperti tenaga kerja yang ahli dalam menggunakan traktor.

Kemudian menurut Soekartawi (1994:7-9) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor produksi tenaga kerja adalah :

- 1) Tersedianya Tenaga Kerja.

Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal.

2) Kualitas Tenaga Kerja.

Dalam proses produksi selalu diperlukan spesialisasi. Persediaan tenaga kerja spesialisasi ini diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi pekerjaan tertentu, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Bila masalah kualitas tenaga kerja ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kemacetan dalam proses produksi.

3) Jenis Kelamin.

Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, apalagi dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja pria mempunyai spesialisasi dalam bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, dan tenaga kerja wanita mengerjakan tanam.

4) Tenaga Kerja Musiman.

Karena proses produksi pertanian ditentukan oleh musim, maka terjadilah penyediaan tenaga kerja musiman dan pengangguran tenaga kerja musiman. Sehingga konsekuensinya terjadi migrasi atau urbanisasi musiman. Akibat lebih lanjut adalah adanya fluktuasi upah tenaga kerja.

5) Upah Tenaga Kerja.

Besar kecilnya upah tenaga kerja ditentukan oleh berbagai hal, antara lain dipengaruhi oleh:

- a) Mekanisme pasar atau bekerjanya sistem pasar. Pasar yang tidak sempurna menjadikan upah tenaga kerja menjadi tidak menentu dan sering berubah-ubah setiap saat.
- b) Jenis kelamin. Upah tenaga pria pada umumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan upah tenaga kerja wanita.
- c) Kualitas tenaga kerja juga menentukan besar kecilnya upah. Namun karena sistem pasar tenaga kerja yang tidak baik, seringkali dijumpai bahwa yang berpendidikan atau berketerampilan tinggi belum mendapatkan imbalan yang tinggi.
- d) Umur tenaga kerja juga sering menjadi penentu besar kecilnya upah. Penilaian terhadap upah perlu di standarisasi menjadi hari orang kerja (HOK) atau hari kerja orang (HKO) atau biasanya disebut hari kerja setara pria (HKSP).

Menurut Hernanto (dalam Sentosa, 1992:24) jenis tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja manusia
- b) Tenaga kerja ternak
- c) Tenaga kerja mekanik

Selanjutnya tenaga kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak. Tenaga kerja pria dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan dan pekerja wanita umumnya untuk menanam, panen dan lain-lainnya. Sedangkan tenaga kerja ternak digunakan untuk pengolahan tanah dan pengangkutan, begitu pula halnya dengan

tenaga kerja mekanik digunakan untuk pengolahan tanah, menyemprotkan serta untuk panen. Tenaga mekanik ini bersifat substitusi dari tenaga kerja ternak dan manusia.

Sehubungan dengan terdapatnya beberapa jenis tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani, maka dalam analisa ketenagakerjaan dan juga untuk memudahkan melakukan perbandingan tenaga kerja dalam usaha tani diperlukan adanya standarisasi satuan tenaga kerja. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan ukuran Hari Orang Kerja (HOK) atau biasa juga disebut dengan Hari Kerja Setara Pria (HKSP). Menurut Soehardjo (dalam Sentosa 1992:25) hari kerja pria atau Hari Orang Kerja merupakan satuan ukuran kerja setara pria dewasa (*man equivalent*), dimana tenaga kerja wanita, anak-anak, hewan dan mesin-mesin dikonversikan sesuai dengan seorang pria dewasa.

Cara mengkonversikan tenaga kerja tersebut antara lain dapat dilakukan dengan jalan membandingkan besar kecilnya upah tenaga kerja dan dapat juga dengan membandingkan tenaga kerja pria sebagai ukuran baku dan jenis tenaga kerja lain dikonversikan atau disetarakan dengan tenaga kerja pria. Pengkonversian tenaga kerja berdasarkan besar kecilnya upah yang diterima adalah bersifat tidak rasional, karena daya mampu tidak diukur secara jelas, akan tetapi dihitung sama untuk setiap tenaga kerja. Sedangkan pengkonversian tenaga kerja dengan membandingkan tenaga kerja pria sebagai ukuran baku

dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini digunakan konversi tenaga kerja dengan jalan membandingkan tenaga kerja pria dewasa sebagai ukuran baku dan jenis tenaga kerja lain disetarakan dengan tenaga kerja pria dewasa, seperti yang dibuat oleh Yang (1988) dan Zein (1983).

Zein (dalam Sentosa, 1992:26) membuat konversi tenaga kerja pria, wanita, ternak dan anak-anak sebagai berikut:

1 Pria	= 1 hari kerja pria
1 wanita	= 0,7 hari kerja pria
1 ternak	= 2 hari kerja pria
1 anak	= 0,5 hari kerja pria

Zein (dalam Sentosa, 1992:26) membuat konversi tenaga kerja traktor sebagai berikut :

1 traktor mini	= 26,16 hari kerja pria
1 traktor tangan	= 18 hari kerja pria

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti akan memerlukan tenaga kerja, terutama dalam hal produksi. Tersedia tidaknya tenaga kerja dapat mempengaruhi jumlah produksi. Jumlah tenaga kerja yang banyak dan memiliki keterampilan di bidang pertanian akan dapat meningkatkan produksi dari segi jumlah dan mutu.

b. Bibit

Bibit adalah bahan tanaman berupa tanaman yang kecil yang berpotensi untuk tumbuh dewasa yang berasal dari tanaman sejenis,

misalnya: akar, batang dan daun. Menurut Kartasaputra (2003:3) yang dimaksud dengan bibit adalah biji tanaman yang diperlukan untuk pengembangan usaha tani.

Kemudian menurut Sutopo (2002:1) benih adalah simbol permulaan yang merupakan inti dari kehidupan alam semesta dan yang paling penting penggunaannya dalam penyambung dari kehidupan tanaman.

Penggunaan benih termasuk dalam usaha penanaman dan pemeliharaan. Oleh karena itu, penggunaan benih dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan. Benih dengan mutu yang tinggi sangat diperlukan karena merupakan salah satu sarana untuk dapat menghasilkan tanaman yang berproduksi maksimal (Sutopo, 2002:2)

Menurut Kartasapoetra (2003:5) menjelaskan benih yang bermutu adalah benih yang telah dinyatakan sebagai benih yang berkualitas dan jenis tanaman unggul. Benih yang berkualitas memiliki daya tumbuh lebih dari 90% dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki viabilitas atau dapat mempertahankan kelangsungan pertumbuhan menjadi yang baik, tumbuh dengan normal dan merupakan tanaman yang menghasilkan atau disebut benih yang matang.
- 2) Memiliki kemurnian artinya terbebas dari kotoran benih jenis tanaman lain atau hama penyakit.

Sedangkan menurut Sutopo (2002:3) mutu suatu benih dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut: kebenaran varietas, kemurnian

benih, daya hidup (daya kecambah dan kekuatan tumbuh) serta bebas dari hama dan penyakit benih.

Kemudian menurut Kartasapoetra (2003:7) secara umum faktor fisik yang harus diperhatikan untuk menilai mutu benih, ialah:

- 1) Benih yang bersih tidak tercampur dengan potongan-potongan tangkai yang kering, biji-bijian yang lain, debu, dan lain-lain.
- 2) Warna benih terang dan tidak kusam (mengkilat)
- 3) Berwarna kuning muda, tidak bercak-bercak hitam, besar benih normal (tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar)
- 4) Yang bernas atau yang berisi.
- 5) Tidak terlalu kering.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemilahan bibit merupakan hal yang paling awal dari usaha tani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan penggunaan bibit dengan varietas unggul akan meningkatkan produksi padi yang baik pula.

c. Pupuk

Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung (Peraturan Bupati Agam Nomor 42 tahun 2012).

Menurut Sutedjo (2010:8) pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun anorganik, dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dalam tanah, ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam lingkungan yang baik.

Pemberian pupuk pada tanaman berguna untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah agar produksi tanaman tetap normal

bahkan meningkat. Tujuan pemupukan memungkinkan tercapainya keseimbangan antara unsur hara baik yang terangkat saat panen, erosi, atau pencucian lainnya sehingga dapat tercapainya hasil produksi yang lebih baik dan berkualitas.

Adapun Klasifikasi pupuk menurut Sutedjo (2010:90) yaitu:

- 1) Berdasarkan kandungan unsur hara
 - a) Pupuk tunggal, yaitu pupuk yang hanya mengandung satu macam unsur hara. Misalnya urea yang hanya mengandung N, TSP hanya mengandung P.
 - b) Pupuk majemuk, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara, misalnya DAP yang mengandung N dan P
- 2) Berdasarkan kadar kandungan unsur haranya
 - a) Berkadar hara tinggi, yaitu kandungan unsur haranya lebih dari 30%. Misalnya TSP yang mengandung 45% P_2O_5 .
 - b) Berkadar hara sedang, yaitu kandungan unsur haranya 20-30%, misalnya abu dapur yang mengandung 10-30% K_2O .
 - c) Berkadar hara rendah, kandungan unsur haranya 20%, misalnya FMP yang mengandung unsur hara 19% K.
- 3) Berdasarkan reaksi kimia
 - a) Pupuk masam
 - b) Pupuk netral
 - c) Pupuk basa

4) Berdasarkan pembuatannya

- a) Pupuk alam, yaitu pupuk yang tidak dibuat di pabrik. Pupuk ini dicirikan dengan kelarutan unsur haranya yang rendah di dalam tanah. Pupuk ini bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Contohnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, dan kotoran.
- b) Pupuk buatan, yaitu pupuk yang dibuat di pabrik, umumnya kandungan unsur hara dan kelarutannya tinggi dan berguna untuk memperbaiki sifat kimia tanah. Misalnya urea, TSP, dan DAP

5) Berdasarkan kelarutannya

- a) Larut dalam air (+)
- b) Larut dalam asam citrat (=)
- c) Larut dalam asam keras (x)

Adapun dosis penggunaan pupuk yang tepat untuk padi menurut

UPT BP4K2P yaitu:

Pupuk Urea	= 200kg/ha
Pupuk SP-36	= 100kg/ha
Pupuk KCL	= 100kg/ha
NPK	= 100kg/ha

Kebutuhan pupuk merupakan jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian sesuai dengan target produksi yang ditetapkan, baik untuk musim, setahun kemudian atau dalam beberapa tahun kemudian dalam jangka waktu yang panjang, jumlah pupuk dipakai menurut tempat dan waktu.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pupuk pada padi, tidak hanya tahu cara pemberian, waktu pemberian dan dosis atau takaran tiap pemberian juga harus tepat. Selain itu, dari sekian macam pupuk yang tersedia petani harus memilih pupuk apa yang mutlak diperlukan oleh padi. Hal ini dimaksudkan supaya hasil produksi menjadi lebih banyak dan berkualitas.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian sejenis ini menggambarkan tentang penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni:

1. Marisa (2011), dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan subsidi pupuk masih dikategorikan belum efektif berdasarkan empat indikator tepat (harga, tempat, waktu, dan jumlah). Ketidakefektifan subsidi pupuk juga berpengaruh terhadap produksi padi yang dapat dilihat dari dummy efektivitas kebijakan harga. Dummy efektivitas harga bernilai positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa apabila kebijakan subsidi pupuk efektif maka dapat meningkatkan produksi padi. Variabel harga pupuk urea mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap permintaan pupuk urea. Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan pada harga pupuk urea maka akan terjadi penurunan permintaan pupuk urea. Variabel luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dummy benih, dan dummy efektivitas harga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produksi padi. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan

terhadap faktor-faktor tersebut maka akan berpengaruh terhadap produksi padi.

2. Kasiyanti (2010), menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara subsidi pupuk terhadap peningkatan output sektor produksi dan pendapatan rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan pupuk bersubsidi di Jawa Tengah sebesar 24 persen dari anggaran nasional, dengan asumsi teknologi produksi tetap dan faktor produksi lain tetap, maka akan mampu menaikkan output secara umum pada tahun 2008 sebesar Rp 3.455.333 juta. Artinya pengadaan pupuk bersubsidi yang dilakukan pemerintah akan meningkatkan produksi. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk subsidi akan meningkatkan proses produksi dan permintaan terhadap input sektor tersebut, selanjutnya tingkat pendapatan rumah tangga akan meningkat. Dampak pengadaan pupuk bersubsidi diprediksikan akan berdampak pada kenaikan pendapatan rumah tangga di Jawa tengah secara keseluruhan.
3. Akbar (2009), menemukan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas luas lahan terhadap produksi cabe di kecamatan X Koto kabupaten Tanah datar dengan asumsi *ceteris paribus*. Penggunaan pupuk secara parsial berpengaruh positif terhadap produksi cabe dengan asumsi *ceteris paribus*. Penggunaan pestisida secara parsial berpengaruh positif terhadap produksi cabe dengan asumsi *ceteris paribus*. Penggunaan tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap produksi cabe dengan asumsi *ceteris paribus*. Harga secara parsial

berpengaruh positif terhadap produksi cabe dengan asumsi *ceteris paribus*. Dan penggunaan bibit secara parsial berpengaruh positif terhadap produksi cabe dengan asumsi *ceteris paribus*. Sedangkan variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi cabe di kecamatan X Koto kabupaten Tanah Datar. Kemudian secara bersama-sama luas lahan, pupuk, pestisida, tenaga kerja, harga, penggunaan bibit dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi cabe di kecamatan X koto kabupaten Tanah Datar.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang akan diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas kebijakan subsidi pupuk dan pengaruhnya terhadap produksi padi dengan studi kasus kecamatan Baso. Adapun variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tenaga kerja (X_1), bibit (X_2), pupuk (X_3) dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk (D) yang diukur berdasarkan empat indikator (tepat harga, jumlah, tempat dan waktu) sebagai variabel bebas dan produksi padi sebagai variabel terikat (Y).

Jumlah tenaga kerja yang digunakan berpengaruh positif terhadap proses produksi. Karena tenaga kerja merupakan faktor vital dalam mengelola dan menangani peralatan dan pengaturan serta menciptakan teknologi bagi keberhasilan dan kelancaran produksi. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan maka cenderung produksi petani juga akan mengalami peningkatan.

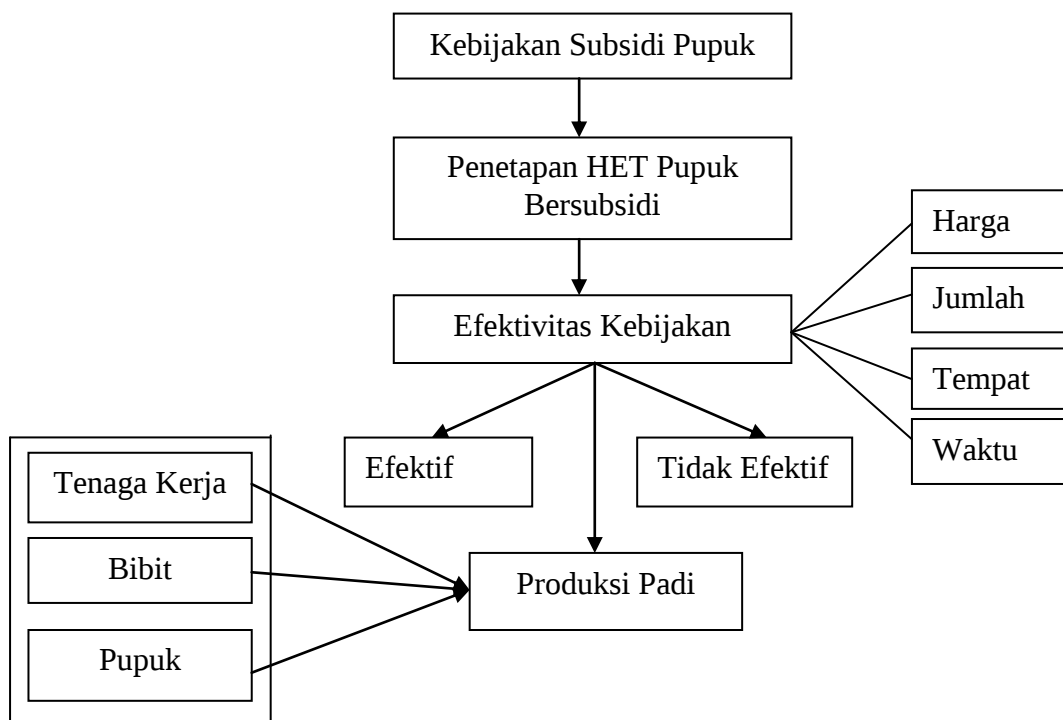
Bibit memiliki pengaruh yang positif terhadap proses produksi karena semakin besar penggunaan bibit maka cenderung produksi petani padi juga akan mengalami peningkatan.

Pupuk mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan produksi padi. Hal ini disebabkan karena pupuk akan menyebabkan kualitas mutu dan jumlah komoditi menjadi lebih banyak. Kelengkapan dan keefisienan penggunaan pupuk berpengaruh positif terhadap produksi padi karena semakin efisien penggunaan pupuk maka cenderung produksi padi juga akan mengalami peningkatan.

Efektivitas kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan empat indikator keberhasilan yaitu harga, jumlah, tempat dan waktu. Kebijakan subsidi telah memenuhi syarat tepat harga apabila harga aktual sesuai dengan HET. Tepat jumlah yaitu apabila jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani sesuai rekomendasi terpenuhi. Tepat tempat terpenuhi apabila pupuk tersedia di dalam desa, dan tepat waktu terpenuhi apabila pupuk tersedia pada saat dibutuhkan oleh petani.

Dapat dideskripsikan bahwa kebijakan subsidi pupuk dinyatakan efektif atau tidak apabila telah terpenuhinya empat indikator yaitu harga, jumlah, tempat, dan waktu. Kemudian kebijakan subsidi pupuk ini berpengaruh terhadap produksi padi.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Fator-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi (Studi Kasus: Kecamatan Baso)

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris, sesuai dengan rumusan masalah dari kajian teori, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap produksi padi di kecamatan Baso.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

2. Bibit mempunyai pengaruh signifikan terhadap produksi padi di kecamatan Baso.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_a: \beta_2 \neq 0$$

3. Pupuk mempunyai pengaruh signifikan terhadap produksi padi di kecamatan Baso.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

4. Efektivitas kebijakan subsidi pupuk (tepat harga, tempat, waktu, jumlah) mempunyai pengaruh signifikan terhadap produksi padi di kecamatan Baso.

$$H_0: \beta_4 = 0$$

$$H_a: \beta_4 \neq 0$$

5. Secara bersama-sama tenaga kerja, bibit, pupuk dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk mempunyai pengaruh signifikan terhadap produksi padi di kecamatan Baso.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a: \text{salah satu } \beta \neq 0$$

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Kebijakan subsidi pupuk yang diukur berdasarkan empat indikator yaitu tepat harga, jumlah, tempat dan waktu. Berdasarkan keempat indikator tersebut maka kebijakan subsidi pupuk belum dapat dikategorikan efektif, dikarenakan masih adanya masalah pada mekanisme distribusi pupuk. Dengan rata-rata tingkat persentase sebesar 48,71 % atau persentase ketepatan kurang dari 80 %.
2. Secara parsial produksi padi di kecamatan Baso dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja. Diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,438 > 1,9861$), dengan tingkat pengaruh jumlah tenaga kerja sebesar 0,170 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Berarti semakin meningkat jumlah tenaga kerja maka hasil produksi padi di kecamatan Baso akan semakin meningkat pula.
3. Secara parsial produksi padi di kecamatan Baso dipengaruhi oleh penggunaan bibit. Diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,971 > 1,9861$), dengan tingkat pengaruh jumlah bibit sebesar 1,145 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Berarti semakin meningkat jumlah bibit maka jumlah produksi padi di kecamatan Baso akan semakin meningkat pula.
4. Secara parsial produksi padi di kecamatan Baso dipengaruhi oleh jumlah penggunaan pupuk. Diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,007 > 1,9861$), dengan tingkat pengaruh sebesar 0,163 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*.

Berarti semakin meningkat jumlah penggunaan pupuk maka jumlah produksi padi di kecamatan Baso akan semakin meningkat pula.

5. Secara parsial produksi padi di kecamatan Baso tidak dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,644 < 1,9861$), dengan tingkat pengaruh sebesar 0,079 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Berarti semakin meningkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk maka hasil produksi padi di kecamatan Baso akan semakin meningkat pula, sebaliknya apabila kebijakan subsidi pupuk belum efektif maka produksi akan menurun. Namun variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi di kecamatan Baso.
6. Secara bersama-sama produksi padi di kecamatan Baso dipengaruhi oleh tenaga kerja, bibit, pupuk, dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Dimana nilai signifikannya sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, apabila tenaga kerja, bibit, pupuk, dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk meningkat secara bersama-sama, maka jumlah produksi padi di kecamatan Baso juga akan meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat direkomendasikan untuk peningkatan efektivitas kebijakan subsidi pupuk serta produksi adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pemerintah harus memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi pupuk karena subsidi pupuk masih belum dikategorikan efektif. Perbaikan ini terutama dalam kaitannya dengan tepat

harga agar harga yang diperoleh petani berada pada HET, tepat jumlah dimana sebaiknya dilakukan penyuluhan oleh anggota Pemerintah dari Dinas pertanian tentang anjuran pemakaian pupuk sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Kemudian tepat tempat, sebaiknya kios resmi pupuk bersubsidi berada didalam desa sehingga tidak membutuhkan biaya transportasi.

2. Dinas pertanian diharapkan lebih intensif membina para petani dalam menghadapi hama/penyakit tanaman dan dapat memberikan solusi terbaik, agar tanaman terbebas dari penyakit, serta penyuluhan kepada petani dalam penggunaan teknologi dan mengupayakan sistem pertanian yang canggih serta modern sehingga dengan sendirinya jumlah produksi padi juga akan meningkat.
3. Diharapkan kepada petani agar dapat mengoptimalkan penggunaan lahan usahatani mereka, seta penggunaan pupuk kandang agar tingkat kesuburan tanah tetap terjaga, kemudian disarankan agar petani lebih belajar dari pengalaman dan memperbanyak pengetahuan mengenai cara membudidayakan tanaman padi baik melalui pelatihan- pelatihan maupun penyuluhan- penyuluhan yang diadakan.
4. Perlu adanya perbaikan baik dari segi penyaluran, pengawasan maupun hal lain-lain yang mendukung terwujudnya kebijakan subsidi pupuk yang efektif. Kedepannya kebijakan subsidi pupuk masih harus dilaksanakan karena menurut responden harga pupuk non subsidi terlalu mahal, kebutuhan pupuk banyak, modal petani terbatas, dan laba produksi yang

sedikit, hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar meningkatnya produksi padi.

5. Tingkat produksi padi tidak hanya dipengaruhi oleh empat variabel bebas yang penulis teliti, karena masih banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Seperti variabel non ekonomi yaitu kehidupan sosial petani maupun lingkungan tidak dimasukkan. Maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dan meneliti faktor-faktor lain diluar variabel yang penulis teliti. Sehingga akan dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi jumlah produksi petani padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2005. *Statistika 1(Teori dan Aplikasi)*. Padang: FE-UNP.
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kabupaten Agam Dalam Angka 2013*
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan Sumatera Barat 2007-2001*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga
- Daniel, Moehar. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI
- Kartasapoetra, Ance G. 2003. *Teknologi Benih ; Pengolahan Benih dan Tuntutan Praktikum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kasiyanti, Sri 2010 “*Analisis dampak subsidi harga pupuk terhadap output sektor produksi dan tingkat pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Marisa, Suhaila. 2011. *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya terhadap Produksi Padi (Studi Kasus: Kabupaten Bogor)*. Bogor: IPB
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Pusataka LP3ES Indonesia.
- Peraturan Bupati Agam. 2012. *Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Agam tahun 2013*.
- Peraturan Menteri Perdagangan. 2013. *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*.